



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2023

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Cangakan Karanganyar Kode Pos 57712

Website : www.dispermedes.karanganyarkab.go.id

E mail dispermedes.karanganyarkab.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang secara langsung menangani Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Agar potensi yang dimiliki dapat berperan strategis dalam pembangunan di Kabupaten Karanganyar, Pemberdayaan Masyarakat harus dilakukan dengan prinsip pengentasan kemiskinan yang terencana dan terkoordinasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait, terutama sebagai sasaran utama program pembangunan masyarakat dan desa. Potensi Masyarakat dan Desa yang perlu terus diperhatikan dan dikembangkan, untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berdaya dan mandiri.

Disamping itu perlunya pemanfaatan sumber daya alam dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan penerapan teknologi pedesaan yang berwawasan lingkungan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu unsur pelaksana Instansi yang menangani Pemberdayaan Masyarakat, berkewajiban menyajikan Laporan Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Tahun 2023 yang menjelaskan pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai manifestasi pertanggungjawaban Kepala OPD sesuai Perda Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang dijabarkan dalam program kerja selama satu tahun anggaran perlu dilaporkan dan dievaluasi untuk menilai kinerja OPD. Pelaksanaan program kerja meliputi pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan yang memuat data kuantitatif serta informasi yang dirangkum dari kegiatan pembangunan masyarakat dan desa di Kabupaten Karanganyar.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar .
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023;
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023
7. Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Rencana Kerja Anggaran Penetapan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penetapan.
9. Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas adalah harapan untuk mencapai program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tujuan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan laporan pencapaian

program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan dan Desa yang diadakan pada Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023. Laporan Pelaksanaan Tugas ini untuk mengkomunikasikan pencapaian indikator tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggung jawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

DESKRIPSI UNIT KERJA

A. Tugas dan Fungsi.

Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.

Adapun Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 1a, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan.;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
- 4) pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan

fungsinya

2. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

a. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian, dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam (a), Sekretaris mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian kegiatan;
2. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
4. pengoordinasian tatalaksana;
5. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
9. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 2. Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, ketatalaksanaan, keorganisasian, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi Dispermades.
3. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
- a. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa merupakan unsur pelaksana Administrasi Pemerintahan Desa.
 - b. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - 1) Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan persiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi Pemerintahan Desa.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi:
 - a. persiapan bahan perumusan kebijakan bidang administrasi pemerintahan desa dan perangkat desa;
 - b. persiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang administrasi pemerintahan desa dan perangkat desa;
 - c. persiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi pemerintahan desa dan perangkat desa; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.
4. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- a. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa merupakan unsur pelaksana pengelolaan keuangan dan aset desa.

b. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1) Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan dan aset desa.

2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang perencanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa serta pengelolaan aset desa;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; dan

d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

a. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan unsur pelaksana pemberdayaan masyarakat desa

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

B. Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD.

Program Nasional yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Karanganyar yaitu Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

C. Standard Operating Procedure (SOP) OPD.

Standard Operating Procedure Dinas Pemberdayaan Masyarakat ada di pelaksanaan Dana Desa (DD), SOP pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

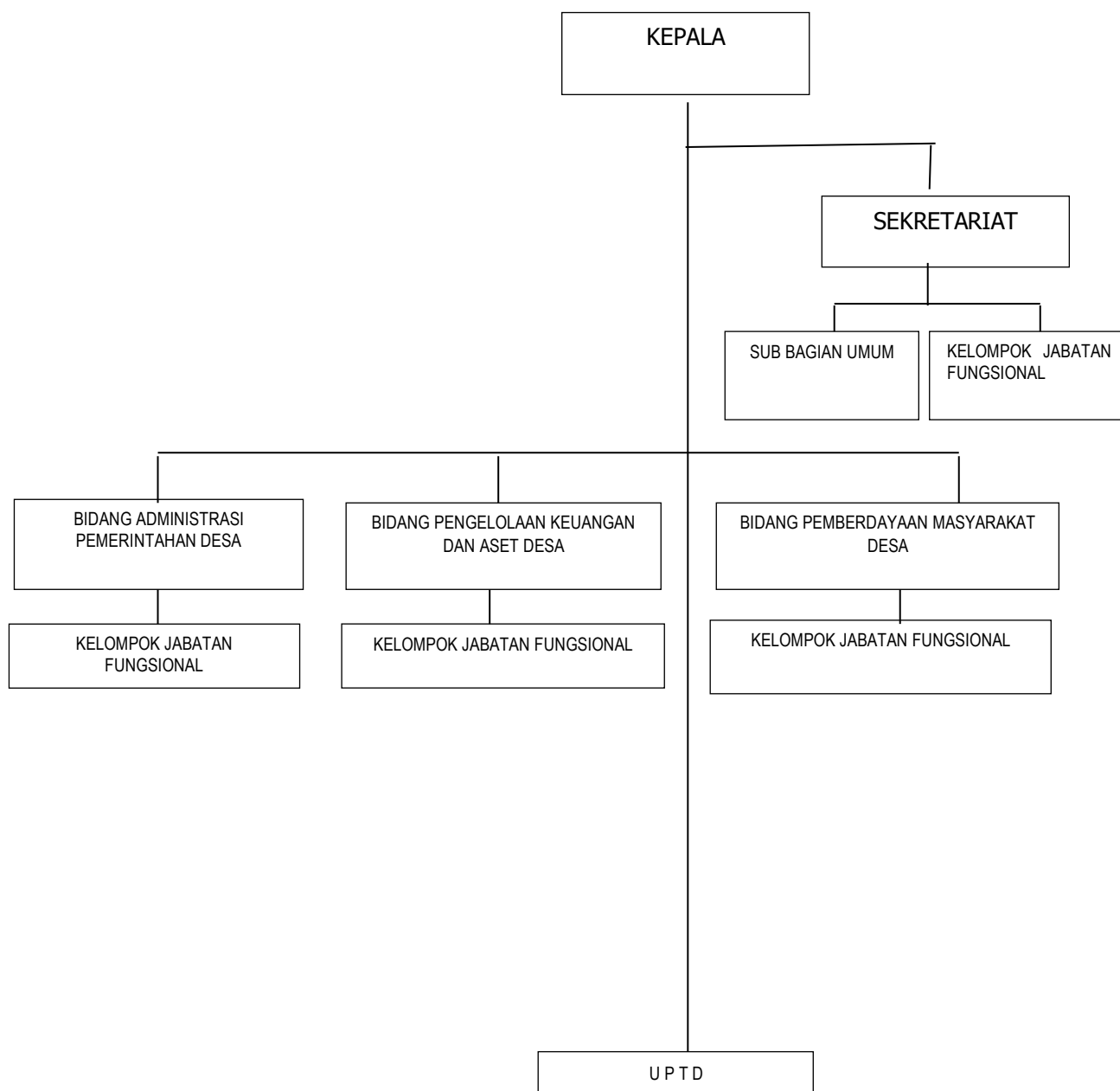
D. Peraturan Daerah / Peraturan Bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022;
3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022;
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa.
5. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 411.2/128 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, Sengkuyung II, dan Sengkuyung III

E. Struktur Organisasi.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar. Adapun Bagan Susunan Organisasi sebagai berikut :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR**



F. Kepegawaian Berdasarkan Urusan yang dilaksanakan.

1). Daftar Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

N O	NAMA	NIP	(PNS/ CPNS)	PANGKAT/ GOLONGAN
1	2	3	4	5
1.	Sundoro Budhi Karyanto, S.Sos	19620620 199203 1 002	PNS	Pembina Utama Muda / IV.c
2.	Soenarto, S.P, M.M	19710315 199703 1 009	PNS	Pembina Tk.I/ IV.b
3.	Ary Widyastutik, S.STP, MM	19820123 200012 2 001	PNS	Pembina / IV.a
4.	Diana Ary Andriyati, S.H	19830704 200604 2 008	PNS	Penata Tk.I / III.d
5.	Y. Anung Darmawan, SE	19720528 200501 1 005	PNS	Penata Tk.I / III.d
6.	Sudinar, S.Pd, MM	19710319 199203 1 003	PNS	Pembina / IV.a
7.	Ngadiyono, SE, MM	19730211 199503 1 003	PNS	Pembina / IV.a
8.	Asih Dwi Mawartini, SE	19660323 199603 2 001	PNS	Pembina / IV.a
9.	Agus Cahyono, S.Sos, M.Si	19710811 200604 1 011	PNS	Pembina / IV.a
10.	Agus Setyawan, S.Sos	19710805 199301 1 002	PNS	Penata Tk.I / III.d
11.	Ardhyka Mur Hermawan, SIP, MM	19870121 200701 1 002	PNS	Penata Tk.I / III.d
12.	Rahayu Nurrohmani, SH	19790910 200604 2 017	PNS	Penata Tk.I / III.d
13.	Harun Waskito, S.Sos, MAP	19800420 200912 1 001	PNS	Penata Tk.I / III.d

14.	Agus Priyono, SE	19740820 200312 1 002	PNS	Penata Tk.I / III.d
15.	Hariyanti, S.Sos	19670109 199402 2 001	PNS	Penata Tk.I / III.d
16.	Eko Pujiati, S.H	19800707 200604 2 027	PNS	Penata Tk.I / III.d
17.	Dwi Prihanto, S.IP, MSi	19810221 201001 1 017	PNS	Penata Tk.I / III.d
18.	Joko Sunaryo	19660415 199303 1 008	PNS	Penata Muda Tk.I / III.b
19.	Sri Purwati, S.Sos	19791218 201101 2 009	PNS	Penata / III.c
20.	Jalu Prasetya Aji, S.A.P, MSi	19800704 201101 1 010	PNS	Penata / III.c
21.	Willyanto Wardhana ,S.Sos	19850419 201101 1 013	PNS	Penata / III.c
22.	Muhammad Safi'i, S.Mn	19800721 200012 1 001	PNS	Penata Muda Tk.I / III.b
23.	Irfan Afifudin, S.Sos	19850608 201101 1 013	PNS	Penata / III.c
24.	Priska Hevianggitasari, S.Sos	19870130 201101 2 012	PNS	Penata / III.c
25.	Andri Yudiyanto, SE	19840517 201503 1 003	PNS	Penata / III.c
26.	Andi Prasetyanto,A.Md	19860314 201001 1 012	PNS	Penata Muda / III.a
27.	Zaldiyah, S.Sos	19760723 200701 2 020	PNS	Penata Muda Tk.I/ III.b
28.	Fajar Setya Nugraha, S.Kom	19871116 202012 1 006	PNS	Penata Muda / III.a
29.	Wahono Guntur Prakosa, SE	19890220 202012 1 006	PNS	Penata Muda / III.a

30.	Ippolita Suharto, SE	19930628 202012 2 007	PNS	Penata Muda / III.a
31.	Mario sebastian Prabowo, SIP	19890331 202203 1 002	PNS	Penata Muda / III.a
32.	Vika Mutiara Pradanai, S.Sos	19971219 202203 2 018	PNS	Penata Muda / III.a
33.	Bagas Kurnia Adi, SIP	19981129 202203 1 006	PNS	Penata Muda / III.a
34.	Alina Prama Septa, A.Md	19880901 201503 2 003	PNS	Penata Muda / III.a
35.	Dewan Sidiq Atmaja Putra, A.Md	19901212 201503 1 006	PNS	Penata Muda / III.a
36.	Tri Suwarno	19730219 200701 1 007	PNS	Penata Muda / III.a
37.	Hartono	19790906 201001 1 012	PNS	Pengatur / II.c
38.	Suroto	19750627 200701 1 001	PNS	Pengatur Muda / II.a
39.	Ramdhan Ashari, A.Md	19960204 202203 1 005	PNS	Pengatur / II.c
40.	Wahyu Setyanto,SH	-	THL	-
41.	Irawan Andi Prasetyo	-	THL	-
42.	Sigit Danu Asmoro, S.Sos	-	THL	
43.	Nita Ariyani, S.Sos	-	THL	
44.	Eka Masihi Juniyanto, S.I.Pust	-	THL	
45.	Elya Pangestuti, SP	-	THL	
46.	Lufika Herawati Lukito, A.Md	-	THL	
47.	Rengga Alan Diatmaja, SE	-	THL	

48.	Agung Widodo, SH	-	THL	
49.	Ratih Dwi Untari, SE	-	THL	
50.	Putri Nova Budi Dimastuti, S.Ak	-	THL	
51.	Bintar Bani Riyadi	-	THL	
52.	Rian Handoko Putro, SM	-	THL	
53.	Sony Widiyarto, S.Kom	-	THL	

2).Daftar Pejabat Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terisi

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	MEMENUHI PERSYARATAN DIKLAT PIM	MEMENUHI SYARAT KEPANGKATAN
1.	Sundoro Budhi Karyanto, S.Sos	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	YA	YA
2.	Soenarto, S.P, M.M	Sekretaris	YA	YA
3	Y. Anung Darmawan, SE	Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	YA	YA
4	Diana Ary Andriyati, S.H	Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Belum Diklat	YA
5.	Ary Widyahastutik, S.STP, M.M	Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa	Belum diklat	YA

			Pim III	
6.	Agus Cahyono, S.Sos, MSi	Kepala Sub . Bagian Umum	Belum diklat Pim IV	YA

- 3). Daftar Pejabat Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang belum terisi

NO	JABATAN STRUKTURAL	ESELON
	Nihil	

Semua eselon IV kecuali Kasubag Umum dan Kepegawaian, mengalami penyetaraan menjadi Jabatan Fungsional.

- 4). Daftar Pejabat Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Umum/khusus)

NO	NAMA	NIP	NAMA JABATAN FUNGSIONAL
1.	Sudinar, S.Pd, MM	19710319 199203 1 003	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda
2.	Ngadiyono, SE, MM	19730211 199503 1 003	Perencana Ahli Muda
3.	Asih Dwi Mawartini, SE	19660323 199603 2 001	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda
4.	Agus Setyawan, S.Sos	19710805 199301 1 002	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda
5.	Harun Waskito, S.Sos, MAP	19800420 200912 1 001	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda
6.	Ardhyka Mur Hermawan, SIP,MM	19870121 200701 1 002	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda
7.	Rahayu Nurrohmani, SH	19790910 200604 2 017	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda

8.	Dwi Prihanto, SIP, MSi	19810221 201001 1 017	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda
9.	Sri Purwati,S.Sos	19791218 201101 2 009	Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama
10.	Jalu Prasetya Aji, S.A.P, MSi	19800704 201101 1 010	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda
11.	Willyanto Wardhana,S.Sos	19850419 201101 1 013	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda
12	Irfan Afifudin,S.Sos	19850608 201101 1 013	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda
13	Priska Hevianggitasari, S.Sos	19870130 201101 2 012	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda
14	Andi Prasetyanto,A.Md	19860414 201001 1 012	Pranata Komputer Lanjutan
15	Agus Priyono, SE	19740820 200312 1 002	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa
16	Haryanti,S.Sos	19670109 199402 2 001	Analisis Desa/Kelurahan pada Seksi Perencanaan dan Pelaporan
17	Eko Pujiati, SH	19800707 200604 2 027	Penata Laporan Keuangan pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
18	Joko Sunaryo	19660415 199303 1 008	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
19	Andri Yudiyanto, SE	19840517 201503 1 003	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
20	Muhammad Safi'l,	19800721 20012 1	Analisis Pemberdayaan

	S.Mn	001	Masyarakat pada seksi partisipasi masyarakat desa dan pelestarian adat
21	Zaldiyah, S.Sos	19760723 200701 2 020	Pengembang Sarana dan Prasarana
22	Fajar Setya Nugraha, S.Kom	19871116 202012 1 006	Analisis Data dan Informasi
23	Wahono Guntur Prakosa, SE	19890220 202012 1 006	Analisis Desa/Kelurahan pada seksi pengelolaan informasi desa
24	Ippolita Suharto, SE	19930628 202012 2 007	Analisis Pemerintahan umum dan Otonomi Daerah
25	Mario sebastian Prabowo, SIP	19890331 202203 1 002	Analisis Desa/Kelurahan pada Seksi Perencanaan dan Pelaporan
26	Vika Mutiara Pradanai, S.Sos	19971219 202203 2 018	Analisis Pemberdayaan Masyarakat pada seksi partisipasi masyarakat desa dan pelestarian adat
27	Bagas Kurnia Adi, SIP	19981129 202203 1 006	Analisis Desa/Kelurahan pada seksi pengelolaan informasi desa
28	Alina Prama Septa, A.Md.	19880901 201503 2 003	Bendahara
29	Hartono	19790906 201001 1 012	Pengelola Kepegawaian pada Su Bag Umum
30	Dewan Sidiq Atmaja Putra, AMd	19901212 201503 1 006	Analisis Desa/Kelurahan Pada Seksi Pengelolaan Asset Desa
31	Suroto	19750627 200701 1 011	Analisis desa/Kelurahan pada Seksi Penata Usahaan Keuangan Desa

32	Tri Suwarno	19730219 200701 1 007	Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum
33	Ramdhan Ashari, A.Md	19960204 202203 1 005	Verifikator

BAB III

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Nihil

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1. Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	IKK Output dan Capaian Kinerja		IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
1	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0,00 Ket.:	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	0,00 Persen Ket. : Tidak ada desa tertinggal
2	2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0,00 Ket.:	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa berkembang (per awal tahun n)	Pembilang = 8.00 Desa Penyebut = 9.00 Desa Hasil = 88,89
	3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0,00 Ket.:			
	4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0,00 Ket.:			

C. URUSAN PILIHAN

Nihil

D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

Nihil

BAB IV

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Data Belum Tersedia	
			b. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Data Belum Tersedia	

			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
				2)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Data Belum Tersedia
			c. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN UPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Data Belum Tersedia
			d. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN UPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Data Belum Tersedia

		e. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Data Belum Tersedia
		f. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Data Belum Tersedia
			2)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Data Belum Tersedia
		g. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE	1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Data Belum Tersedia

			MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
			h. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Data Belum Tersedia
				2)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Data Belum Tersedia
			i. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan	1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Data Belum Tersedia

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dinas Jabatan	
		j. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Data Belum Tersedia
		k. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Data Belum Tersedia

				2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Data Belum Tersedia
				3)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Data Belum Tersedia
			I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Data Belum Tersedia

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Nihil

C. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		a. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	1) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			Data Belum Tersedia	

		<p>KATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKA T HUKUM ADAT, Kegiatan Pemberdayaa n Lembaga Ke masyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaa n Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabup aten/Kota serta Pemberdayaa n Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kot a</p>			
		<p>b. PROGRAM A DMINISTRASI PEMERINTAH AN DESA,</p>	1)	<p>Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan</p>	Data Belum Tersedia

			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kelurahan	
			c. PROGRAM P ENINGKATAN KERJA SAMA DESA, Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	1) Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Data Belum Tersedia
				2) Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Data Belum Tersedia
			d. PROGRAM P EMBERDAYA AN LEMBAGA KEMASYARA KATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKA T HUKUM ADAT, Kegiatan Pemberdayaa n Lembaga Ke	1) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Data Belum Tersedia

			<p>masyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>			
				2)	<p>Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),</p>	Data Belum Tersedia

				Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
		e. PROGRAM A DMINISTRASI PEMERINTAH AN DESA, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggar aan Administrasi Pemerintahan Desa	1)	Fasilitasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Data Belum Tersedia
			2)	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Data Belum Tersedia
			3)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Data Belum Tersedia
		f. PROGRAM P EMBERDAYA AN LEMBAGA KEMASYARA KATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKA T HUKUM ADAT, Kegiatan	1)	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Data Belum Tersedia

			<p>Pemberdayaa n Lembaga Ke masyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaa n Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabup aten/Kota serta Pemberdayaa n Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kot a</p>			
		g.	<p>ADMINISTRASI PEMERINTAH AN DESA, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggar aan Administrasi</p>	1)	<p>Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</p>	Data Belum Tersedia

			Pemerintahan Desa			
				2)	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Data Belum Tersedia
				3)	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Data Belum Tersedia
				4)	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Data Belum Tersedia
			h. PROGRAM PENATAAN DESA, Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	1)	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Data Belum Tersedia
				2)	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Data Belum Tersedia
			i. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, Kegiatan	1)	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Data Belum Tersedia

			<p>Pemberdayaan Lembaga Ke masyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>			
		j.	<p>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi</p>	1)	<p>Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa</p>	Data Belum Tersedia

		Pemerintahan Desa			
			2)	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Data Belum Tersedia
		k. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang	1)	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Data Belum Tersedia

			Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kot a			
		I.	PROGRAM A DMINISTRASI PEMERINTAH AN DESA, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggar aan Administrasi Pemerintahan Desa	1)	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Data Belum Tersedia

D. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN*Nihil***E. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN***Nihil***F. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN***Nihil***G. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN***Nihil***H. UNSUR KEWILAYAHAN**

I. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Nihil

J. UNSUR KEKHUSUSAN

Nihil

Nihil

BAB V

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

A. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH KABUPATEN

No	Kementerian / LPNK	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keterangan
Nihil								

B. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH KABUPATEN

No	Bidang Urusan	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keterangan
Nihil								

C. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DESA

No	Kabupaten	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keterangan
1	Dispermade sdukcapil	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tanggal 4 September 2023 tentang Pedoman Perubahan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah	Pogram Bantuan Keuangan kepada Desa Kegiatan Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana dan Prasarana	1 Tersalurnya Bantuan Keuangan Sarpras Desa	162 Desa	92.480.000.000	162	
2	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Perbup Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Perbup Nomor 105 Tahun 2022 tentang Tata	Pogram Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan Kegiatan Bantuan	1 Tersalurnya Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)	162 Desa	95.861.015.400	162	

		Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023	Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)					
3	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Perbup Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Perbup Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa	Pogram Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan Kegiatan Bantuan Hasil Bagi Restribusi Daerah	1 Tersalurnya Bantuan Keuangan Bagi Hasil Retribusi Daerah	162 Desa	965.767.080	162	
4	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Perbup Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Perbup Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa	Pogram Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Kegiatan Bagi Hasil Pajak Daerah	1 Tersalurnya Bantuan Keuangan Bagi Hasil Pajak Daerah	162 Desa	20.601.000.000	162	
5	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	SK Bupati Karanganyar Nomor 412.1/871 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi & Alokasi Bankeu Kepada Desa untuk	Pogram Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa Kegiatan Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa	1 Tersalurnya Bantuan Keuangan Sarpras Desa	162 Desa	49.877.650.000	162	

		Pembangunan Sarpras						
6	Dispermade sdukcapil	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tanggal 4 September 2023 tentang Pedoman Perubahan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah	Pogram Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Kegiatan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	1 Tersalurnya Bantuan Keuangan Operasional KPMD	162 Desa	810.000.000	162	
7	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	SK Bupati Karanganyar Nomor 412.1/1018 Tahun 20223 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana desa Tahun 2023 Tahap II	Pogram Bantuan Keuangan kepada Desa Kegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana Desa	1 Tersalurnya Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Desa (Sarpras Desa)	124 Desa	21.193.500.000	124 Desa	
8	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	PMK RI Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa - Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang	Pogram Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Kegiatan Bantuan Keuangan Dana Desa (DD)	1 Tersalurnya Bantuan Keuangan Dana Desa	162 Desa	175.562.791.000	162	

		Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023						
9	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	PMK RI Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan PMK RI Nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan dana desa	Pogram Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Kegiatan Bantuan Keuangan Dana Desa (DD)	1 Tersalurnya Bantuan Keuangan Dana Desa (DD)	33 Desa	4.643.186.000	33 Desa	
10	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	Pogram Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kegiatan Pengembangan BUM Desa	1 Tersalurnya Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan BUM Desa	24 Desa	1.200.000.000	24 Desa	

BAB VII PENUTUP

1. Pelaksanaan Tugas Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2023, secara umum telah dapat berjalan baik dan sangat dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat, sehingga kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sangat diharapkan masyarakat sebagai wahana untuk pencapaian kesejahteraan dan percepatan perkembangan perekonomian masyarakat yang menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan pembangunan.
2. Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun anggaran yang akan datang agar program dan kegiatan yang ada perlu terus dilanjutkan sehingga melalui program kegiatan tersebut dapat dijadikan sarana guna terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di wilayah Kabupaten Karanganyar.

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR



SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos, M.A.P

NIP. 19720620 199203 1 002